

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindakan Persekusi

Istilah Persekusi sudah mulai banyak dikenal masyarakat sebagai suatu tindakan yang merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas dan juga masuk dalam ranah pelanggaran hukum pidana. Bahkan tindakan persekusi di anggap sebagai suatu tindakan yang lebih berat dari tindakan main hakim sendiri, karena korban dari tindakan persekusi belum tentu bersalah dan hanya baru dugaan melakukan suatu tindak pidana.

Hukum yang digunakan sekelompok masyarakat yang seperti itulah yang sering disebut hukum rimba. Artinya korban belum dibuktikan kesalahannya tetapi sudah dieksekusi oleh eksekutor yang bukan aparat hukum. Sedangkan dalam sistim hukum pidana kita telah disebutkan bahwa yang mempunyai kewenangan melakukan eksekusi (artinya melaksanakan putusan lembaga peradilan pidana) adalah lembaga negara yang bernama Kejaksaan. Dan masyarakat tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada korban.

Sebelum penulis membahas tentang bentuk-bentuk tindakan persekusi, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang posisi terjadinya tindakan persekusi, adapun Posisi kasusnya sebagai berikut :

a) Posisi Kasus

Kasus 1 :

Pada tanggal 19 Mei 2017, Dr Fiera Lovita setelah mengunggah statusnya tersebut di *Facebook*, Fiera Lovita mengajak kedua anaknya untuk jalan keluar rumah sambil makan siang. Karena kebetulan saat itu adalah hari Minggu, Fiera memutuskan untuk bermain bersama anaknya di permainan anak-anak hingga sore. Pada saat malam harinya, Fiera membuka *Facebook* dan tak menyangka dirinya mendapatkan permintaan pertemanan yang berjumlah lebih dari 100 orang. Bahkan terdapat beberapa akun orang lain yang mengcapture statusnya dan membagikannya ke *Facebook* dengan ditambah kata bernada provokatif yang mengajak orang lain untuk membencinya.

Selanjutnya pada hari Senin 22 Mei 2017, Fiera Lovita tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa, seperti mengantar anak ke sekolah kemudian lanjut berangkat ke tempatnya bekerja di RSUD Solok. Kemudian pukul 09.00, dr Fiera Lovita mendapat telepon dari RSUD Solok yang meminta ia segera menemui Wakil Direktur RSUD Solok, dr Elfahmi. Saat menghadap Wakil Direktur Rumah sakit umum daerah (RSUD) Solok, dr Fiera Lovita diberitahu bahwa postingan *Facebook*-nya sudah dicapture orang lain dan dibagikan ke banyak grup *Facebook* dengan ditambah kata provokatif dengan tuduhan bahwa Fiera lovita telah menghina ulama mereka.

Pihak manajemen RSUD Solok lalu meminta Fiera Lovita menghapus postingan dan menghilangkan data di profilnya yang menyebut dr Fiera Lovita bekerja di RSUD Solok. Perintah itu langsung dipenuhi oleh Fiera Lovita. Setelahnya, Fiera langsung menjemput anaknya di sekolah dan mendapatkan telepon dari RSUD Solok untuk menyampaikan bahwa ada Intel dari Polsek Solok yang mencarinya. Anggota Intel tersebut meminta Fiera untuk ikut dengan mereka. Awalnya mereka meminta untuk ke rumah Fiera Lovita namun ditolak olehnya.

Kemudian anggota Intel meminta membawa Fiera Lovita ke Polsek, juga ditolak oleh Fiera Lovita. Akhirnya Fiera Lovita dibawa ke RSUD Solok bersama dua anaknya yang baru pulang sekolah. Saat di RSUD Solok itulah, tiga intel tersebut memperkenalkan diri, di antaranya ada Kasat Intel yang bernama Ridwan. Ridwan ini menunjukkan konten *Facebook* dari *handphone*-nya bahwa ternyata terdapat kelompok yang tidak senang dengan unggahan Fiera Lovita dan berencana akan menggerebeknya.

Dengan alasan melindungi, Kasat Intel lalu mengintrograsi Fiera Lovina dengan menanyakan identitas data diri hingga

mengapa membuat postingan itu. Fiera Lovita menjawab status itu dibuat secara spontan karena ia melihat berita di media massa soal kasus chat mesum. Tak disangka, statusnya tersebut menjadi *virial* dan dibagikan oleh banyak orang dengan ditambahkan kata-kata provokatif dengan tujuan orang yang membaca menganggap bahwa dia telah menghina ulama besar. Padahal menurutnya, status itu normatif tanpa menyebut nama maupun mencantumkan foto seseorang.

Fiera Lovita juga menceritakan bahwa dirinya sempat ditanyai oleh Ridwan, apakah ada pihak lain yang memerintah dan mendorongnya untuk membuat status tersebut. Namun Fiera Lovita menjawabnya tidak ada, karena memang ia membuat status tersebut secara spontan. Selanjutnya Ridwan pun meminta Fiera Lovita untuk jangan macam-macam dan cukup menjalankan tugasnya sebagai dokter saja. Tidak hanya itu, Ridwan juga meminta Fiera tetap berhati-hati dan menghubunginya jika ada hal tidak diinginkan terjadi. Setelah selesai diintrograsi Fiera Lovita dan dua anaknya kembali ke rumah. Saat di dalam mobil tiba-tiba saja mobilnya sudah dikelilingi oleh orang berjubah, berjanggut dan berkopiah putih.

Mereka mengetuk jendela mobilnya dan Fiera Lovita langsung menghubungi Ridwan, selanjutnya mencoba komunikasi dengan sekelompok orang tersebut. Dalam komunikasi itu, Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam memintanya jangan membuat status seperti itu, mereka juga menuntut Fiera Lovita untuk membuat surat pernyataan tulis tangan dikertas, difoto lalu di-posting ke akun *Facebook*-nya. Dalam perjalanannya, Fiera Lovita mampir ke masjid untuk salat dengan keadaan anaknya masih menangis selanjutnya bergegas pulang. Di rumah, Fiera Lovita dan dua anaknya masih dirundung perasaan takut dan cemas.

Fiera Lovita menghubungi rekan dan koleganya mengenai kondisi saat itu. Namun semua temannya tidak ada yang bisa menolong maupun menemaninya di rumah. Kemudian, Fiera pun mengunggah surat pernyataan dan permintaan maafnya di *Facebook*. Dalam waktu satu jam saja, *Facebook* Fiera kembali dibongkar. Bahkan album foto pribadi yang berisi fotonya dan anak-anaknya hingga unggahan lamanya kembali dimunculkan. Kemudian disebar ke grup *Facebook*, dengan terlebih dahulu di edit dengan konten *vulgar* dan tidak sesonoh serta ditambahi dengan kata jorok yang sangat tidak pantas untuk perempuan.

Kondisi setelah postingan permintaan maaf itu diunggah malah semakin membuat situasi tidak terkendali. Fiera Lovita memutuskan untuk menutup akun *Facebook*-nya kembali demi kenyamanan dan keamanan. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2017 keluarga kecil ini kembali beraktivitas biasa mengantar anak ke sekolah. Tiba-tiba, Fiera Lovina kembali mendapat telepon dari

RSUD Solok diminta segera ke rumah sakit. Sesampainya di RSUD Solok, telah banyak orang berjubah di halaman RSUD termasuk juga mobil polisi. Fiera Lovita panik dan langsung masuk ke dalam rumah sakit. Fiera Lovita lalu menemui Wakil Direktur Rumah Sakit, dr Elfahmi. Dia diberitahu bahwa terdapat sekelompok pimpinan ormas, termasuk ketua FPI ingin bertemu dengannya.

Wakil Direktur rumah sakit meminta Fiera untuk patuh agar tidak berlanjut ke hal yang tidak diinginkan. Kemudian ia dibawa ke sebuah ruangan yang sudah dihadiri oleh Direktur RSUD Solok drg Epi, yang marah besar karena menganggap Fiera membawa masalah bagi rumah sakit. Akhirnya dr Fiera Lovita dibawa ke ruang pertemuan dengan para petinggi ormas FPI, Kepala Kepolisian Sektor Solok, Kasat Intel Solok beserta direktur dan jajaran direksi RSUD Solok. Dia diminta untuk menyampaikan permintaan maaf, menyesal dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Setelah Fiera Lovita menyampaikan permintaan maaf secara terbata-bata, lanjut secara bergantian petinggi ormas dan FPI memperkenalkan diri dan menceramahi dirinya.

Pada intinya, mereka tidak terima dengan postingan Fiera Lovita. Pertemuan tersebut ternyata belum menyelesaikan masalah yang dihadapi Fiera. Diketahui, foto pertemuan antara ia dengan pimpinan ormas dan lainnya kembali *viral* dan dia makin dipergunjingkan. Setelah foto tersebut menyebar, setiap hari ada saja orang asing yang berkeliaran di sekitar rumah Fiera. Tidak hanya itu saja ia juga sering mendapat intimidasi berupa telepon dan juga gerombolan orang bermotor lewat di depan rumahnya dengan meneriakinya. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 23.45 WIB, Kepala Kepolisian Resort Solok datang ke rumah Fiera Lovita, namun tidak direspon karena saat dihubungi *handphone*-nya dalam keadaan tidak bersuara.

Kemudian pada tanggal 27 Mei 2017 Kepala Kepolisian Resort Solok kembali ke rumah Fiera dan membawanya ke Kepolisian Resort Solok hingga waktu berbuka puasa. Pada pukul 22.00 WIB, Fiera kembali dihubungi Kapolres untuk hadir dalam pertemuan dengan instansi daerah seperti Wali Kota, Bupati, Wakil Bupati, wakil masyarakat, RSUD Solok, dan FPI. Namun, Fiera menolak karena kelelahan. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2017 Fiera didatangi tiga pria yang mengaku dari Kodim. Karena merasa ketakutan, Fiera tidak mau menemui ketiga lelaki tersebut. Ketiganya sempat bertahan selama satu jam di depan rumah Fiera, setelah menunggu lama akhirnya mereka memutuskan untuk pergi. Karena ketakutan yang semakin menjadi, Fiera Lovita memutuskan untuk pindah dari Solok dan mendapat bantuan dari koleganya yang berada di luar Sumatra Barat.

Kemudian pada tanggal 29 Mei 2017 Fiera dijemput oleh relawan dari Jakarta. Sebelum berangkat, Fiera juga sempat pamit kepada petugas keamanan di Kepolisian Sektor Solok. Saat berangkat ke bandara pun ia dikawal dan didampingi oleh Banser. Atas serangkaian peristiwa tersebut, dr Fiera Lovita berharap peristiwa yang menyimpannya tidak terjadi lagi kepada siapapun.

Kasus II :

Pada tanggal 26 Mei 2017 Mario memasang status di *facebook* terkait FPI. Status tersebut berisi mulai penyebutan FPI sebagai kumpulan orang pengangguran, mengedit foto Habib Rizieq, serta menantang berkelahi. Kemudian pada tanggal 28 Mei 2017 kelompok massa FPI datang mencari kontrakan Mario. Dan mereka menemukannya di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Saat itu Ketua Rukun Warga saksi Zainal Arifin mendapat laporan adanya sekelompok orang diduga FPI ribut-ribut dikontrakan Mario Alfian. Salah satu anggota FPI telah menjelaskan bahwa Mario telah melecehkan FPI.

Selanjutnya saksi membawa Mario dan anggota FPI ke kantor RW 06. Di Kantor RW 06 korban didudukkan dengan dikelilingi oleh sekelompok anggota FPI. Saat itu Mario dipaksa membuat surat pernyataan yang isinya korban mengakui telah melakukan pelecehan terhadap FPI. Seperti dalam video yang tersebar dan setelah surat pernyataan dibuat, ada pelaku mengintimidasi dan menampar pipi Mario. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2017 video kasus Mario *viral* di media sosial. Publik mengecam persekusi dan pemukulan pada Mario. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2017 polisi mendapat laporan mengenai kasus ini lewat video yang menyebar di internet, polisi langsung melakukan penyelidikan.

Pada tanggal 1 Juni 2017 Polisi mengamankan Mario dan keluarganya. Mario lalu melakukan pelaporan atas pemukulan yang dia terima. Polisi menangkap 2 orang anggota FPI yang diduga melakukan pemukulan. Kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2017 FPI menyampaikan bahwa akan memberikan pendampingan hukum. Status 2 orang itu masih diperiksa. Kasus ini tengah diusut oleh kepolisian. Saat ini, PMA dan keluarganya sudah dievakuasi ke Polda Metro Jaya untuk menghindari kekerasan lanjutan. Polisi menyebut pelaku persekusi adalah 10 orang yang mengaku sebagai anggota FPI. Polisi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus persekusi terhadap M (15). Kedua tersangka tersebut bernama Abdul Majid (22) dan Mat Husin alias Ucin (57).

Adapun dari posisi kasus tersebut penulis menyimpulkan beberapa bentuk-bentuk pelaku tindakan perskusi untuk melakukan tindakan persekusi terhadap seseorang atau individu oleh sekelompok orang atau organisasi masyarakat. Berikut penulis akan menguraikan lebih jelas tentang bentuk-bentuk persekusi. Pola bentuk – bentuk untuk melakukan tindakan persekusi melalui beberapa tahapan yang dilakukan oleh kelompok tertentu dalam melancarkan aksi persekusinya. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Pola tindakan persekusi :

- 1) Pelaku telah menentukan target
- 2) Membuka identitas, foto, alamat, kantor, atau rumah target dan menyebarkannya dengan dalih kebencian.
- 3) Pelaku menginstruksikan massa kelompok atau organisasi secara bersama-sama untuk memburu target dengan cara mengepung rumah atau kantornya serta target diintimidasi, ditekan dibuat tidak nyaman.
- 4) Memaksa target membuat surat pernyataan permintaan maaf tertulis di atas materai kemudian menyebarkan dengan cara mengunggah foto atau divideokan melalui media massa.
- 5) Jika target menolak maka seorang atau sekelompok orang akan membawa paksa target ke kantor polisi di luar kehendak yang bersangkutan dengan aduan pelanggaran Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang

penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) atau Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.

2. Bentuk-Bentuk tindakan Persekusi

- 1) Pengancaman
- 2) Penganiayaan
- 3) Pengeroyokan
- 4) Penculikan
- 5) Dan Memaksa Masuk Rumah Tanpa Hak

Selanjutnya secara garis besar penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa melihat dari bentuk-bentuk tindakan persekusi tersebut tindakan persekusi telah memenuhi unsur kejahatan dan tidak terlepas dari teori kriminologi yang di paparkan penulis dalam bab II tinjauan pustaka bahwa kriminologi pada dasar-nya merupakan ilmu yang mempelajari mengenai tentang kejahatan, agar supaya memahami sebab-musabab terjadinya kejahatan, serta mempelajari tentang pelakunya yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau yang disebut penjahat. Setra penulis sangat sependapat dengan ada-nya Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Assosiation Theory*) dimana artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

Oleh sebab itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan kriminal bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Proses yang

dipelajari tadi bukan hanya melalui teknik kejahatan sesungguhnya tetapi juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial. Tingkah laku jahat dapat dipelajari dari interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah suatu teknik untuk dapat melakukan kejahatan dan serta alasan-alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut, menjelesakan mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Dalam hal ini bermaksud untuk mempelajari pandangan dan serta tanggapan terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala - gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Berhubungan dengan terjadinya tindakan persekusi itu sendiri merupakan perbuatan melanggar hukum terjadi sebagai akibat atau gejala sosial dimana menghasilkan suatu tindakan melawan hukum.

B. Analisis Tindakan Persekusi Dalam Perundang-Undangan Pidana.

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 November 2001. Penegasan dalam konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan.

Menurut John Locke :⁵³

Negara terbentuk berdasarkan *pactum unionis*, yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk negara. Dengan demikian, setiap individu telah menyerahkan hak-haknya secara sukarela kepada negara dalam suatu kontrak *social* (*du Contrat Social*). Oleh karena itu, negara diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap siapapun sebagaimana telah digariskan dalam undang-undang (*ius puniendi*).

Klasifikasi tindak pidana persekusi hingga tahun 2017 belum pernah cantumkan dan dimuat dalam suatu instrumen hukum yang mengikat di Indonesia. Oleh sebab itu, maka untuk tuduhan tindak pidana persekusi adalah suatu kekeliruan secara keilmuan hukum. Sebagaimana diketahui hukum pidana menganut asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman, kalau tak ada ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya. Asas tersebut merupakan asas mendasar yang wajib dan harus dipahami oleh sarjana hukum. Oleh karena itu, penggunaan istilah tindak pidana persekusi untuk menilai suatu perbuatan hukum seharusnya kurang tepat dilakukan oleh ahli-ahli hukum karena secara implisit tindak pidana persekusi belum di atur dalam undang-undang.

Dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa persekusi terdiri dari 1 suku kata yaitu per-se-ku-si yang artinya adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga

⁵³ Lukman Surya Saputra, *Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme*, Bandung : PT Setia Purnama Inves, 2007, hlm.130

dan disakiti, dipersusah atau ditumpas. Jika diperhatikan pengertian persekusi sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas dapat maka dapat disimpulkan bahwa persekusi merupakan tindakan kejahatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok atau sejumlah warga/masyarakat lainnya yang didalamnya terjadi tindakan seperti menyakiti, mempersusah dan menumpas seseorang, kelompok atau warga tersebut.

Persekusi dapat terjadi akibat kebebasan berpendapat yang berlebihan di media sosial, orang dapat dengan bebas dan seenaknya melakukan penghinaan terhadap ulama atau tokoh lain, sedangkan disisi lain pihak yang merasa menjadi korban penghinaan tidak lagi percaya kepada penegak hukum sehingga muncul tindakan persekusi.

Praktik persekusi ini dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatas namakan kelompok atau organisasi masyarakat tertentu, tindakan ini dilakukan dengan dalih pembelaan agama dan kelompoknya serta dalam menentukan sasaran tindakan persekusi, tidak terkonsentrasi pada identitas atau kelompok tertentu, dari kasus yang dialami oleh dokter Fiera Lovita warga Solok Sumatera Barat dan pada Mario Alvian, remaja 15 tahun warga Cipinang Muara, Jakarta Timur dimana persekusi yang dialami oleh keduanya disebabkan oleh kritik terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab sehingga pelaku persekusi menganggap keduanya melakukan ujaran kebencian.

Persekusi merupakan suatu perlakuan buruk atau suatu penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama atau pandangan politik. Persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang didefinisikan di dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Timbulnya penderitaan, pelecehan, penahanan dan ketakutan menjadi indikator munculnya persekusi, tetapi hanya penderitaan yang cukup berat yang dapat dikelompokkan sebagai persekusi.

Persekusi merupakan pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang disakiti, dipersusah atau ditumpas. Literatur yang ada mengungkap bahwa persekusi ini erat kaitannya dengan penggiringan isu agama seperti yang terjadi pada umat kristiani di sekitar tahun 1960 dan 1970-an tentang larangan sekolah negeri untuk tidak mensponsori acara keagamaan. Penggunaan burqa (*cadar*) umat muslim di beberapa negara juga sering mengalami persekusi, sebagai contoh history persekusi yang ada.

Dari bentuk-bentuk tindakan persekusi, tindakan persekusi tersebut dapat di kategorikan sebagai bentuk tindakan penganiayaan, tindakan pengancaman, pengeroyokan, penculikan, dan memaksakan masuk rumah tanpa hak, adapun unsur-unsur yang terpenuhi sebagai berikut :

1. Unsur-unsur dari penganiayaan

- 1) Adanya kesengajaan
- 2) Adanya perbuatan

- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
- 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”.⁵⁴

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.

⁵⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1994, hlm, 120

3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Sebagaimana pengaturannya diatur dalam Pasal 351 tentang

Penganiayaan yaitu :

- 1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

2. Unsur-unsur dari pengancaman

Unsur - Unsur obyektif, yang meliputi unsur - unsur :

- 1) Memaksa.
- 2) Orang lain.
- 3) Dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman
- 4) Akan membuka rahasia.
- 5) Supaya memberi hutang.
- 6) Menghapus piutang.

Unsur - Unsur subyektif, yang meliputi :

- 1) Dengan maksud.

2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Jika dalam melakukan persekusi terjadi dengan pengancaman maka sanksi pidananya Pasal 369 KUHP tentang pengancaman yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

3. Unsur-unsur dari pengeroyokan

1) Barang siapa

Zij atau mereka, ini berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah “orang banyak”, artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama-sama. Tapi ini tidak berarti bahwa semua orang yang ikut serta dalam kerusuhan seperti itu menjadi dapat dipidana. Yang dapat dipidana hanyalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan seperti itu. Kenyataan bahwa seseorang itu berada di tengah-tengah gerombolan orang banyak yang melakukan kekerasan-

kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, tidak dengan sendirinya membuat orang tersebut dapat dipidana.⁵⁵

2) Terang-terangan

- a. Karena pasal 170 ayat (1) KUHP itu telah tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dalam pengertiannya.
- b. Selanjutnya telah dikatakan oleh profesor SIMONS, bahwa dengan memperhatikan sejarah terbentuknya pasal ini dan dengan memperhatikan penempatannya dalam Bab V dari Buku II KUHP, *Hoge Raad* (tanggal 12 April 1897, W.6955 ; tanggal 15 Maret 1915, N.J.1915 hal.751, W.9798 ; tanggal 22 Desember 1919, N.J.1920 hal.86, W.10515) berpendapat bahwa yang dapat dimasukkan kedalam pengertian *openlijk geweld* menurut pasal 170 ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum”, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata *openlijk* atau secara terbuka didalam rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP itu sendiri.

⁵⁵ P.A.F LAMINTANG, SH : *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Bandung : Binacipta 1986, hlm.297-298

c. Di lain pihak profesor van HAMEL telah bermaksud untuk membatasi pengertian dari kata kekerasan tersebut berdasarkan kenyataan bahwa perbuatan itu harus dilakukan secara *openlijk*, maka yang dimaksud dengan *openlijk geweld* atau kekerasan secara terbuka itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang.⁵⁶

3) Dengan tenaga bersama

Profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER berpendapat, bahwa kata *verenigde krachten* itu harus diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan. Menurut profesor-profesor tersebut, dalam hal ini para pelaku itu setidak-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya. Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan met *verenigde krachten*.

Tentang hal tersebut berkatalah profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER antara lain bahwa : Dua orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan., agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara

⁵⁶ *Ibid.* P.A.F. LAMINTANG, hlm.302-303

bersama-sama, lain halnya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 214 KUHP. Dimana pun undang-undang berbicara tentang bersama-sama di situ selalu disebut dua orang atau lebih.” menggunakan kekerasan.⁵⁷

4) Terhadap orang atau barang

- a. *Tegen personen of goederen* atau terhadap orang-orang atau barang-barang, artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang.
- b. Perlu dicatat bahwa para penerjemah di Indonesia pada umumnya telah menerjemahkan kata *personen* (*persoon* dalam bentuk jamak) dan kata *goederen* (*goed* dalam bentuk jamak) didalam rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP itu dengan kata orang dan barang (dalam bentuk tunggal). Kesalahan-kesalahan yang nampaknya kecil dan tidak mempunyai arti sama sekali seperti itu, kadang-kadang mempunyai akibat yang sangat merugikan bagi penegakan hukum di tanah air. Kesalahan-kesalahan seperti itu sudah barang tentu tidak akan dapat diketahui oleh para pembaca, jika para pembaca tidak mempunyai kesempatan untuk membandingkan rumusan-rumusan tindak pidana - tindak pidana yang terdapat didalam kitab-kitab penerjemahan itu dengan rumusan-rumusan yang

⁵⁷ *Ibid.* P.A.F. LAMINTANG, hlm.306

asli didalam bahasa Belanda yang terdapat didalam *Wetboek van Strafrecht voor Indonesia*.

- c. Pendapat dari profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER sebagaimana tersebut dibawah adalah memang benar, akan tetapi kelirulah pendapat mereka yang mengatakan bahwa apabila suatu kekerasan itu telah ditujukan terhadap satu orang atau terhadap sebuah benda, maka para pelakunya tetap dapat dipersalahkan karena melanggar larangan yang diatur dalam pasal 170 KUHP. Pendapat dari profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER tersebut akan membuat pasal 200, 406 atau 410 KUHP menjadi tidak ada artinya, karena sebagai contoh mereka telah menunjuk pada perbuatan menghancurkan sebuah rumah.⁵⁸

Jika dalam melakukan persekusi dilakukan oleh banyak orang dan terjadi pengeroyokan maka sanksi pidananya telah diatur dalam pasal 170 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

4. Unsur-unsur penculikan

Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk kepada keadaan lahir perbuatan tersebut. Dalam pasal ini, unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut:

⁵⁸ *Ibid.* P.A.F. LAMINTANG, hlm.308-309

a) Membawa pergi seseorang dari kediamannya.

Membawa seseorang pergi dari kediamannya sebetulnya bisa saja tidak merupakan perbuatan atau tindakan melanggar hukum selama tindakan tersebut dilakukan dengan unsur yang baik, seperti menyelamatkan seseorang dari bahaya bencana alam, tentusaja hal tersebut tidak termasuk ke dalam tindakan pidana. Tapi jika tindakan tersebut disertai niat untuk merampas kebebasan atau kemerdekaan si korban. Maka hal itulah yang dimaksud ke dalam delik yang terdapat dalam pasal ini.

b) Membawa pergi seseorang dari tempat tinggal sementara.

Pada unsur yang ke dua ini, si penculik merampas hak kemerdekaan si korban yang sedang berada pada tempat kediaman semmentaranya. Hal ini bahkan bukan hanya bisa terjadi dalam tempat kediaman sementara, bahkan pada saat korban berada di luar tempat tinggalnya pun hal ini bisa terjadi.

Unsur-unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukan adanya niatan si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. Unsur subbjektif ini terletak pada hati sanubari si pelaku delik. Dalam pasal ini, unsur-unsur subjektif adalah sebagai berikut:

a) Dengan Maksud

Dalam konteks ini, si pelaku delik dalam melaksanakan tindakan terlarangnya di sertai dengan kesengajaan. Atau dengan kata lain, si pelaku tindak pidana melakukan penculian tersebut dengan unsur kesengajaan yang bersumber pada kehendak hati untuk bertindak apa yang di perbuatnya itu, yaitu penculikan (perampasan kemerdekaan).

b) Melawan Hukum

Sebenarnya unsur ini adalah kunci bahwa si pelaku penculikan dinyatakan kbersalahannya. Sebab dengan unsur melawan hukumlah tindakan si pelaku delik ini dikatakan sebagai perampasan kemerdekaan. Dan sekaligus unsur ini menyatakan bahwa tindakan ini merupakan penculikan

Atas perbuatan membawa paksa seseorang ke sesuatu tempat, lalu dihakimi, pelaku bisa dijerat Pasal 328 KUHP tentang tindak pidana penculikan yang berbunyi:

“Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

5. Unsur-unsur memaksa masuk rumah

- a. Perbuatan: memaksa masuk ke dalam:
- b. Objek: -rumah; ruangan;pekarangan yang tertutup; yang dipakai orang lain;
- c. dengan melawan hukum.

Perbuatan memaksa/menerobos masuk dengan melawan hukum (*wederrechtelijk binnendringen*) terjadi dalam dua hal, ialah:

- 1) Bila sebelumnya telah diberi suatu tanda larangan bagi orang yang tidak berhak untuk masuk ke dalam sebuah rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup. Misalnya dengan tulisan “dilarang masuk” atau “masuk harus mendapat ijin”, atau pintu pagar atau pintu rumah tertutup rapat dan dikunci. Maka setiap orang yang tanpa hak di larang memasuki rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup meskipun tidak diketahui orang yang berhak. Orang yang masuk itu telah melakukan perbuatan memaksa masuk. Dengan demikian perbuatan itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan memaksa masuk justru terletak pada tidak mengindahkan tanda larangan masuk semacam itu. Artinya orang yang masuk tanpa mengindahkan tanda-tanda larangan tersebut, adalah bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak.
- 2) Bila tanda-tanda larangan masuk tidak ada, kemudian ada orang hendak masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup, oleh orang yang berhak - melarangnya untuk masuk, baik dengan ucapan atau disertai dengan perbuatan, misalnya dengan menghalangi

dengan membentangkan tangannya atau dengan menutup pintu. Orang itu tidak mengindahkannya dan tetap menerobos masuk ke dalam, maka orang itu juga melakukan perbuatan memaksa masuk. Perbuatan memaksa masuk semacam itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan itu terletak pada tidak mengindahkan larangan masuk oleh orang yang berhak tadi. Artinya juga bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak.

Objek rumah (*woning*) haruslah diartikan sebagai suatu tempat yang digunakan oleh orang untuk berdiam/tinggal. Di dalam *Memorie van Antwoord (MvT)*, *woning* dikatakan “*op een slaapgelegenheid aanwezig is*” atau “dimana terdapat suatu kesempatan tidur”⁵⁹ dan itu adalah disebut suatu kediaman. Sebutan tempat kediaman lebih tepat, karena gerbong kereta api atau di bawah kolong jembatan, sebuah perahu⁶⁰ dapat pula disebut tempat kediaman apabila pada kenyataannya tempat itu digunakan orang untuk berdiam/tempat tinggal. *Hoge Raad* dalam pertimbangan suatu putusan tanggal 14 Desember 1914,

⁵⁹ PAF Lamintang dan Djisman Samosir, 1979. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung : Penerbit Tarsito, hlm 112.

⁶⁰ R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1994, hlm 250 .

memasukkan tempat kerja sebagai tempat kediaman, asalkan tempat itu merupakan bagian dari tempat kediaman.⁶¹

Objek ruang tertutup adalah suatu tempat yang tidak dipergunakan untuk tempat tinggal atau berdiam, tapi dipergunakan oleh yang berhak untuk tujuan-tujuan tertentu oleh orang-orang tertentu saja dan bukan untuk umum. Misalnya sebuah bangunan yang diperuntukkan sebagai gudang, sebuah bangunan toko pada saat toko tersebut di tutup dan di kunci oleh yang berhak. Namun apabila sebuah toko merupakan bagian dari sebuah tempat tinggal, maka toko tersebut tidak disebut sebagai ruangan yang tertutup, melainkan sebagai rumah atau tempat tinggal.⁶²

Jika dalam melakukan persekusi dilakukan memaksa masuk rumah tanpa hak dapat dikenakan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

“Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Sedangkan apabila melihat dari media yang dipakai, pelaku tindakan persekusi yang menggunakan media sosial untuk memburu dan mengancam targetnya ini dapat dikenakan Pasal 29 UU ITE yang berbunyi :

⁶¹ PAF Lamintang & Djisman Samosir, *Op.cit.*, hlm 113.

⁶² SR Sianturi, 1989. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta : Penerbit Alumni AHAEM – PETEHAEM, hlm 317.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (*Cyber Stalking*). Ancaman pidana pasal 45 (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

Dari beberapa unsur tindakan persekusi tersebut dapat dilihat bahwa tindakan persekusi berbeda dengan tindakan main hakim sendiri dimana aksi persekusi melalui tahap sistematis dengan cara perencanaan, mencari, kemudian memaksa serta mengeroyok. Sedangkan main hakim sendiri muncul karena spontanitas. Menurut kamus besar bahasa Indonesia main hakim sendiri atau istilah hukumnya *Eigenrichting* adalah menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran dan lain sebagainya. *Eigenrichting* dalam ilmu hukum yaitu merupakan tindakan menghakimi sendiri atau aksi sepihak. Tindakan ini yaitu seperti memukul orang yang telah menipu kita, ataupun tindakan menangkap orang yang tidak mau melunasi hutangnya kepada kita. Tindakan menghakimi sendiri seperti ini merupakan sebuah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri dengan sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan.

Persekusi sendiri merupakan aksi perburuan manusia untuk dihakimi sewenang-wenang dan ini merupakan kejahatan kemanusiaan (*Crime against Humanity*). Namun belum tentu tindakan persekusi merupakan tindakan yang potensial menjadi kejahatan kemanusiaan. Merujuk pada

ketentuan hukum, baik hukum di Indonesia maupun internasional, persekusi harus bersifat sistematis dan terjadi secara meluas. Namun jika tidak dilakukan secara sistematis dan terjadi secara meluas, maka tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan, tetapi tindak pidana biasa (*ordinary crime*).

Suatu kejahatan bisa disebut terjadi secara sistematis jika dilakukan secara terencana, memiliki pola, serta bagian dari kebijakan organisasi atau kelompok tertentu, baik itu negara maupun non-negara. Sementara parameter meluas jika kejadian tersebut terjadi dalam wilayah geografis yang luas.

Terkait tindakan yang dialami seorang dokter di Sumatera Barat dan seorang remaja di Jakarta, Apabila seorang atau sekelompok memasuki rumah atau kantor tanpa seijin oleh pemilik rumah atau kantor yang kemudian tidak diharapkan kehadirannya, hal tersebut melanggar KUHP Pasal 167 ayat 1 tentang masuk pekarangan orang lain dan pidana penjara 9 bulan, kemudian jika seorang atau sekelompok orang memaksa untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan permintaan maaf, hal tersebut melanggar KUHP Pasal 335 ayat 1 butir 1 tentang perbuatan tidak menyenangkan ancamannya pidana penjara 1 tahun, dan jika target menolak maka seorang atau sekelompok orang akan membawa paksa target ke kantor polisi di luar kehendak yang bersangkutan, hal tersebut melanggar KUHP Pasal 333 ayat (1) tentang penculikan ancaman pidana

penjara 8 tahun dengan alasan karena si target dianggap telah melakukan penghinaan agama.

Proses untuk mengetahui apakah termasuk persekusi atau bukan. Proses itu di antaranya, pemantauan, penyelidikan, hingga kajian hukum untuk memvonis beberapa peristiwa dengan pola sama sebagai peristiwa sistematis dan memenuhi unsur persekusi. Jika tidak dilakukan secara sistematis dan terjadi secara meluas merupakan kejahatan pidana biasa. Polisi bisa menggunakan pasal-pasal di dalam KUHP untuk menjerat pelaku, ketika polisi menegakkan hukum, bisa melihat pasal-pasal yang ada dalam hukum pidana Indonesia, karena apabila tidak memenuhi ketentuan atau elemen sistematis atau meluas, maka masuk ke dalam hukum pidana biasa.

Meski begitu, persekusi bila merujuk makna sebenarnya persekusi adalah tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas, terdapat dua elemen dalam persekusi yang bertujuan untuk menyakiti secara fisik dan psikis terhadap target atau korban.

Menurut hemat saya tindakan persekusi merupakan suatu rangkaian yang sistematis untuk mempersekusikan seseorang yang dianggap target dan lebih condong pada perbuatan yang dilatar belakangi perbedaan pandangan politik, sementara main hakim sendiri lebih bersifat umum, walau dalam prakteknya sama-sama cenderung merujuk pada aksi “ramai-

ramai” untuk menghakimi seseorang atau individu yang diduga melakukan tindak kejahatan.

Dengan demikian, persekusi sepertinya kurang tepat bila dipadankan dengan perbuatan main hakim sendiri dimana contoh aksi sekelompok massa yang berusaha menghakimi pelaku kriminal seperti maling motor. Istilah yang tepat untuk aksi tersebut sejauh ini adalah main hakim sendiri meski dilakukan secara beramai-ramai.

Namun yang kita ketahui persekusi dalam bahasa sehari-hari di masyarakat bermakna main hakim sendiri. Istilah main hakim sendiri juga sering digunakan media cetak maupun elektronik saat memberitakan adanya sekelompok orang yang berusaha melukai atau bahkan hingga menimbulkan kehilangan nyawa terhadap pelaku kejahatan seperti kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Tindakan main hakim sering dilakukan secara massal seperti halnya tindakan persekusi yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun organisasi masyarakat untuk menghindari tanggung jawab individu serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang dilakukan masyarakat, massa, kelompok, ataupun organisasi masyarakat dianggap sebagai suatu langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan secara beramai-ramai atau oleh massa dan tindakan persekusi yang sengaja

dilakukan oleh seseorang, kelompok atau organisasi masyarakat terhadap seseorang atau kelompok atau lainnya yang didalamnya terjadi tindakan yang menyakiti, mempersusah dan menghakimi seseorang atau individu yang di duga melakukan tindak kejahatan, dapat kita dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, Namun yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh sebab itu perbuatan pidana yang dilakukan secara beramai-ramai atau massal pembahasannya dititik beratkan pada kata massa atau kelompok. Dalam hal ini kata massa atau sekelompok menunjuk pada pelaku pada perbuatan pidana, dimana dapat diartikan bahwa dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya.

Selanjutnya dari definisi tersebut perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa atau sekelompok dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak atau lebih dari satu orang secara langsung ataupun tidak secara langsung, baik direncanakan atau tidak direncanakan telah terjalin kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara bersama ataupun sendiri dalam hal satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik menimbulkan/mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun non fisik. Hal ini di atur dalam pasal 170 KUHP.

Pasal 170 KUHP berbunyi :

1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

2) Tersalah dihukum:

1) Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.

2) Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh 3. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Sedangkan dalam pasal 170 KUHP mengandung kendala dan kontroversi karena subyek barang siapa menunjuk pelaku satu orang, sedangkan istilah dengan tenaga bersama mengindikasikan suatu kelompok manusia. Delik ini dari penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok atau massa yang tidak teratur melakukan perbuatan pidana, ancamannya hanya ditujukan terhadap orang-orang diantara kelompok benar-benar terbukti serta dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan. Lain halnya dengan massa atau kelompok yang terorganisir dapat digunakan pasal pada delik penyertaan, karena dalam

pasal-pasal nya jelas tentang bagaimana kedudukan para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti massa atau kelompok yang reaksioner tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran dimana massa atau kelompok tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pelaku yang lain.

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah terkait tindakan hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap kelompok serta pelaku-pelaku atau sekumpulan orang yang mengalami kesulitan dalam hal pengaplikasiannya di lapangan. Pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa atau kelompok untuk menentukan batas maksimal dari jumlah massa sukar untuk diketahui, sebagaimana definisi dari kata massa atau kelompok itu sendiri adalah dua orang untuk minimal dan tidak terbatas untuk maksimal. Terdapat 2 kategori dari jumlah massa atau kelompok yaitu, massa yang jelas berapa jumlahnya dan massa atau kelompok yang tidak jelas berapa jumlahnya. Dalam hal ini massa atau kelompok yang jelas berapa jumlahnya adalah dimana massa atau kelompok yang terlibat perbuatan pidana dapat dihitung

berapa jumlahnya dan diketahui seberapa besar keterlibatan dalam melakukan perbuatan pidana, karena hal tersebut sudah diatur dalam hukum pidana yaitu pada delik penyertaan.

Selanjutnya untuk massa atau kelompok yang tidak diketahui berapa banyak jumlah massanya adalah dimana massa atau kelompok tersebut banyak dan sukar dihitung dengan nominal, sehingga menyulitkan dalam menentukan apakah semua massa yang banyak terlibat semua atau tidak, atau hanya sebagian saja. Dapat disimpulkan dalam tulisan ini yang menjadi fokus pembahasan adalah bagaimana pengaturan pada massa atau kelompok atau organisasi masyarakat yang terlibat dalam melakukan perbuatan pidana.

Adapun bagaimana untuk menentukan pelaku tindakan persekusi penulis menggunakan doktrin Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Adapun untuk menentukan kedudukan pelaku tindakan persekusi penulis dapat menarik kesimpulan pelaku tindakan persekusi adalah orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*), dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
- b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya secara garis besar maka penulis dapat menarik kesimpulan namun tidak terlepas dari teori Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus* atau *Samenloop*) yang di paparkan penulis dalam bab II tinjauan pustaka bahwa pelaku tindak pidana dapat dikenakan *Concursus idealis* (pasal 63 KUHP) *Concursus Idealis* (*Eendaadse Samenloop*), yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. System pemberian pidana yang dipakai dalam *concursus* idealis adalah *system absorbs*, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.

C. Analisis Prospek Pengaturan Tindakan Persekusi Dalam Hukum Pidana Indonesia.

Negara merupakan sebuah entitas (kesatuan wilayah) dari unsur-unsur pembentuk negara, yang di dalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah komunitas (masyarakat setempat) yang berlangsung secara timbal balik dan terikat oleh kesatuan wilayah.⁶³ Komunitas atau masyarakat setempat adalah penduduk yang masing-masing anggotanya baik pribadi maupun kelompok saling mengadakan hubungan karena adanya naluri untuk hidup bersama dengan orang lain untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya.⁶⁴ Manusia dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi satu sama lain dipandu oleh nilai-nilai dan dibatasi oleh norma-norma yang ada dalam kehidupan sosial.

Hukum sebagai suatu norma yang ada dalam masyarakat berfungsi untuk mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat. Hukum merupakan perwujudan dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya.⁶⁵

⁶³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, hlm.1.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 2

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 3.

Kenyataannya tidak mudah untuk menerapkan norma/hukum yang ada di dalam masyarakat mengingat bahwa masyarakat dengan mudahnya melanggar norma/hukum demi kepentingan pribadi. Hal demikian dapat memicu masyarakat untuk melakukan suatu penyimpangan ataupun pelanggaran terhadap suatu norma/hukum yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana di dalam masyarakat. Masalah tindak pidana tidak dapat dihindari dan selalu dialami manusia dari waktu ke waktu. Tingkat tindak pidana merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi satu sama lain.⁶⁶

Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Dikdik M. Arief Mansur merumuskan kejahatan (tindak pidana) adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa yang dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.⁶⁷ Tidak dapat dipungkiri jika suatu tindak pidana yang muncul di tengah masyarakat terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri dalam mentaati segala peraturan yang ada serta kurangnya menjaga keamanan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Dalam situasi ini biasanya rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat mendapat gangguan dan menyebabkan keadaan mencekam dan tidak tentram

⁶⁶ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Aksara Baru, hlm. 4.

⁶⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm.56.

yang mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat berupa upaya untuk menghindarkan diri dari kenyataan, berusaha memberantasnya, ataupun reaksi yang berupa tindakan-tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau tindak pidana yang terjadi. Seluruh kenyataan yang dapat disaksikan sekarang, yang menjadi sasaran reaksi masyarakat, adalah tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda, harga diri, perbedaan ideologis dan akibat frustrasi. Pada umumnya masyarakat melakukan tindakan represif terhadap suatu tindak pidana dan cenderung diikuti oleh luapan emosi, sehingga apa yang disebut sebagai “pembalasan” menjadi berlebihan. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mempersiapkan atau penanggulangan terhadap tindak pidana.⁶⁸

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Melalui penegakan hukum diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hukum memiliki fungsi untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Hukum mempertahankan perdamaian dan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-

⁶⁸ Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung : Remadja Karya, hlm.96.

kepentingan tersebut sehingga tercipta suatu kedamaian di dalam masyarakat.⁶⁹

Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan ke dalam penjara pelaku tindak pidana, namun lebih terhadap upaya penegak hukum dapat membimbing warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, maka aparat penegak hukum dapat bertindak menggerakkan peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum. Realita hukum di masyarakat secara khusus hukum pidana masih terdapat permasalahan yang kompleks bermunculan terutama permasalahan tindak pidana yang semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan masyarakat. Aparat penegak hukum telah berusaha memberantas masalah tindak pidana dengan memproses hukum terhadap pelaku tindak pidana untuk diadili dan diberi sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Namun demikian sulit bagi aparat penegak hukum untuk menanggulangi masalah tindak pidana tersebut. Hal ini dibuktikan dengan lemahnya penegakan hukum, terutama lemahnya aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian masih kurang, orang mulai tidak percaya terhadap hukum dan proses hukum ketika hukum itu sendiri masih belum dapat memberikan keadilan serta perlindungan bagi masyarakat.

⁶⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm.12-13.

Tumbuh dan meningkatnya masalah tindak pidana memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah tindak pidana serta dianggap lamban dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat menjadi kecewa terhadap aparat penegak hukum yang ditandai dengan adanya aksi tindakan persekusi karena keamanan dan ketentramannya terganggu oleh pelaku yang di duga melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana. Contoh kasus yang dialami oleh dokter Fiera Lovita warga Solok Sumatera Barat dan pada Mario Alvian, remaja 15 tahun warga Cipinang Muara, Jakarta Timur dimana persekusi yang dialami oleh keduanya disebabkan oleh kritik terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab sehingga pelaku persekusi menganggap keduanya melakukan ujaran kebencian.

Melakukan tindakan persekusi terhadap korban persekusi yang di anggap sebelumnya melakukan tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa dan atau tidak tahu bahwa tidak hanya mereka yang memiliki sebuah hak asasi. Para target yang diduga melakukan tindak pidana pun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta tidak dapat dilupakan pula walaupun target yang diduga melakukan tindak pidana, merupakan bagian dari umat manusia.

Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu di dalam Pasal 28 I (1) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Proses peradilan pidana dapat dimaknai sebagai keseluruhan tahapan pemeriksaan terhadap perkara pidana untuk mengungkap perbuatan pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada pelakunya. Proses peradilan pidana melalui berbagai tahapan yang masing-masing tahapan diwadahi oleh institusi dengan struktur dan kewenangan sendiri-sendiri. Proses peradilan pidana dimulai dari institusi Kepolisian kemudian diteruskan ke Kejaksaan, sampai ke Pengadilan dan berakhir pada Lembaga Perasyarakatan.⁷⁰

Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan terdakwa segera diadili oleh pengadilan. Pasal 51 dan Pasal 59 KUHAP juga mengatur mengenai hak-hak maupun perlindungan hukum bagi tersangka

⁷⁰ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, hlm.62.

pelaku tindak pidana. Meskipun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhannya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi yang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah (asas praduga tidak bersalah). Tujuan diberikannya perlindungan bagi pelaku tindak pidana adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku tindak pidana agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.⁷¹ Pelaku tindak pidana atau seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana seharusnya diproses secara hukum menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bukannya dengan tindakan main hakim sendiri yang melanggar hak asasi pelaku tindak pidana tersebut.

Tindakan persekusi merupakan suatu tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh masyarakat karena hal tersebut sama saja dengan tidak menghargai proses hukum dan hak asasi manusia yang ada di dalam masyarakat. Rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia memang menjadidasar alasan dilakukannya tindakan persekusi dan dianggap merupakan sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, target yang diduga melakukan tindak pidana berhak untuk mendapatkan tindakan balasan berupa tindakan persekusi yang tidak jarang sampai mengintimidasi keluarga target.

⁷¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm.2

Maraknya tindakan persekusi di Indonesia disebabkan dalam penanganannya kasus serupa yang tidak terselesaikan, dalam artian kasus dibiarkan dan ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga timbul pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa tindakan persekusi sendiri merupakan tindakan tegas dalam memberikan sanksi kepada target yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam kasus tindakan persekusi masyarakat atau sekelompok orang atau organisasi melampiaskan perasaan tidak suka kepada orang yang dianggap telah melakukan tindak pidana dalam bentuk sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga disakiti, dipersusah atau ditumpas.

Jika melihat realita yang ada tersebut terget atau korban yang mendapatkan perlakuan tindakan persekusi berupa perbuatan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang disakiti, dipersusah atau ditumpas, maka korban tindakan persekusi dapat melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum. Korban tindakan persekusi termasuk ke dalam *false victims* dimana mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri, dan *provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, dimana korban juga di anggap sebagai sebagai pelaku.⁷² Meskipun dianggap sebagai pelaku tindak pidana tetapi dalam kasus tindakan persekusi, target yang diduga melakukan tindak pidana tersebut juga merupakan korban dari tindak pidana yang mempunyai hak

⁷² *Ibid*, hlm 50

untuk dilindungi secara hukum layaknya korban tindak pidana pada umumnya.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, merupakan salah satu peraturan yang mengatur mengenai pemenuhan hak-hak korban tindak pidana yang terlibat dalam suatu tindak pidana, dan memberikan kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban akibat suatu tindak pidana. Korban dari tindakan persekusi yang juga merupakan pelaku yang dapat diduga melakukan tindak pidana berpotensi tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana layaknya korban tindak pidana pada umumnya.

Adapun penulis menarik sebuah kesimpulan bagaimana prospek pengaturan tindakan persekusi dalam hukum pidana indonesia. Bahwa harus dilakukan perumusan sanksi pidana terkait dengan tindakan persekusi yaitu adanya larangan atau perintah dari suatu norma yang sebelumnya belum ada, atau harus disepakati oleh pembentuk undang-undang. Kesepakatan tersebut dapat diartikan bahwa suatu kebijakan kriminalisasi atau dekriminialisasi suatu perbuatan yang disebut dengan kebijakan penentuan pidana (*criminal policy*).

Dalam hal menentukan unsur-unsur tindak pidana dalam suatu perbuatan tidaklah sulit dibandingkan bagaimana menentukan bobot dan besaran sanksi pidana itu sendiri. Para pembentuk undang-undang sering dipengaruhi secara emosional untuk selalu membalas perbuatan yang dilarang atau yang

diperintahkan dengan pidana penjara atau denda sehingga orang mengatakan bahwa pembentuk undang-undang masih berpegangan pada teori pembalasan (*retributive view*). Padahal di negara lain terutama di negara-negara maju, telah menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) untuk tindak-tindak pidana ringan korbannya telah memaafkan, pelakunya telah uzur, anak-anak atau perempuan hamil. Pidanaan merupakan tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, pidanaan mempunyai makna preventif dalam arti yang luas. Di satu pihak pidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan di lain pihak pidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum).

